

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar fundamental dalam struktur perekonomian daerah, terutama di wilayah agraris. Di banyak daerah, sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan pangan pokok bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber utama mata pencaharian penduduk pedesaan (Mulyani, 2022). Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi pedesaan, serta menjaga stabilitas sosial dan ketahanan pangan (Ridlo & Susilowati, 2018).

Peran tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan ekonomi daerah, terutama ketika sektor-sektor lain mengalami perlambatan akibat dinamika pasar global atau fluktuasi harga komoditas (Meliala & SH, 2023). Afriyanti & Zulkifli, (2018) menyatakan bahwa sektor pertanian merupakan komponen yang sangat strategis dalam perekonomian nasional karena berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto, menyediakan lapangan kerja bagi jutaan penduduk, serta berperan dalam perolehan devisa negara. Selain itu, Firman et al., (2023) menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja (Mahyuddin et al., 2021).

Selain berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok, sektor pertanian juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sektor pertanian merepresentasikan nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai subsektor, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dalam konteks ekonomi daerah, besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mencerminkan peran sektor ini dalam menopang aktivitas ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Kurniawan et al., 2017). Namun demikian, dinamika pertumbuhan sektor pertanian tidak selalu berjalan stabil karena dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, seperti perubahan iklim, keterbatasan teknologi, serta efisiensi produksi (Tambunan, 2011).

Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan adanya fluktuasi bahkan kecenderungan perlambatan pada kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di berbagai daerah. Tambunan, (2011) menemukan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah mencapai rata-rata 35,54 persen per tahun, namun cenderung menurun seiring dengan perubahan struktur ekonomi. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan struktural, seperti menurunnya produksi, terbatasnya inovasi teknologi pertanian, serta pergeseran aktivitas ekonomi ke sektor industri dan jasa. Fauzi & Faizien, (2024), menegaskan bahwa perlambatan kinerja sektor pertanian berkaitan erat dengan rendahnya nilai tambah dan efisiensi produksi.

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada sektor pertanian menjadikan sektor ini memiliki peran ganda, yaitu sebagai sumber kegiatan ekonomi sekaligus penopang kesejahteraan sosial. Perlambatan kinerja sektor pertanian tidak hanya berdampak pada penurunan pendapatan petani, tetapi juga memengaruhi daya beli masyarakat pedesaan, tingkat kemiskinan, serta ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan demikian, kondisi sektor pertanian tidak dapat dipandang sebagai isu sektoral semata, melainkan sebagai cerminan

ketahanan ekonomi daerah secara keseluruhan. Sejalan dengan Afriyanti et al., (2023), sektor pertanian berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Asyerem, (2016), juga menyatakan bahwa daerah yang masih mengandalkan sektor pertanian cenderung memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang lebih rendah karena pertanian berfungsi sebagai penyangga ekonomi masyarakat.

Fenomena fluktuasi pertumbuhan sektor pertanian menjadi semakin relevan untuk ditelaah di tengah upaya pemerintah daerah dalam mendorong investasi melalui kebijakan peningkatan produksi, perbaikan infrastruktur, dan penguatan akses permodalan. Namun demikian, peningkatan investasi dan program bantuan belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian secara berkelanjutan (Rusastra & Saliem, 2010). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah dengan realisasi kinerja ekonomi sektor pertanian. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang memengaruhi kinerja sektor pertanian (Baga & Tinaprilla, 2017).

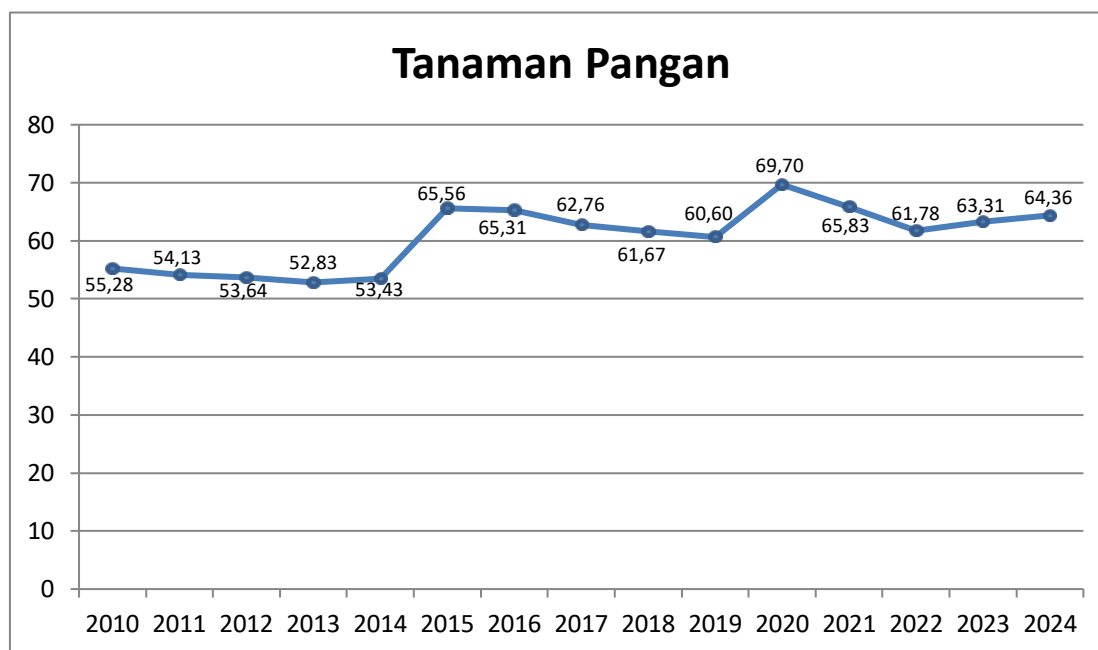
Amaliah & Mahyuddin, (2019) menunjukkan bahwa meskipun sektor pertanian masih menjadi sektor basis di banyak daerah, laju pertumbuhannya cenderung stagnan atau melambat akibat tekanan struktural dan lemahnya inovasi. Selain itu, berbagai variabel makroekonomi, seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, ketersediaan lahan, dan output pertanian, memiliki peran penting dalam menentukan kinerja sektor pertanian dan kontribusinya terhadap PDRB daerah.

Kabupaten Bojonegoro dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik ekonomi yang unik dibandingkan daerah agraris lainnya. Meskipun sebagian besar wilayah Bojonegoro masih didominasi oleh lahan pertanian dan sektor pertanian menjadi sumber mata

pencapaian utama masyarakat pedesaan, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah menunjukkan pola fluktuatif dan cenderung melambat dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara potensi sumber daya pertanian yang dimiliki dengan kinerja ekonomi sektor pertanian yang dihasilkan. Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja yang relatif tinggi, luas lahan pertanian yang cukup besar, serta produksi padi yang berfluktuasi menjadikan Bojonegoro sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi PDRB sektor pertanian secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Bojonegoro untuk memperoleh gambaran empiris mengenai hubungan antara tenaga kerja, lahan, dan produksi padi terhadap PDRB sektor pertanian daerah. Untuk memperkuat gambaran empiris mengenai dinamika sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro, berikut disajikan perkembangan PDRB sektor tanaman pangan selama periode 2010–2024.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto di Bojonegoro



Sumber: BPS Bojonegoro (2025).

Berdasarkan data perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor tanaman pangan Kabupaten Bojonegoro selama periode 2010–2024, terlihat bahwa kinerja sektor ini mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yang mencerminkan dinamika produksi dan produktivitas pertanian daerah. Pada awal periode pengamatan, yaitu tahun 2010, nilai PDRB sektor tanaman pangan tercatat sebesar 55,28. Selanjutnya, nilai tersebut mengalami penurunan secara bertahap menjadi 54,13 pada tahun 2011, 53,64 pada tahun 2012, dan 52,83 pada tahun 2013, sebelum mencapai titik relatif rendah pada tahun 2014 sebesar 53,43 (B.K. Bojonegoro, 2025). Tren penurunan yang terjadi pada periode 2010–2014 mengindikasikan adanya perlambatan kinerja sektor tanaman pangan. Dalam literatur ekonomi pertanian, kondisi tersebut sering dikaitkan dengan pengaruh faktor eksternal seperti variabilitas iklim serta faktor internal berupa penurunan produksi lahan dan keterbatasan penggunaan input produksi secara efisien (Rio et al., 2023).

Memasuki tahun 2015, nilai PDRB sektor tanaman pangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 65,56, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja sektor pertanian dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut relatif berlanjut pada tahun 2016 dengan nilai PDRB sebesar 65,31, meskipun laju pertumbuhannya mulai melambat. Namun demikian, setelah periode tersebut, nilai PDRB kembali mengalami penurunan bertahap menjadi 62,76 pada tahun 2017, 61,67 pada tahun 2018, dan 60,60 pada tahun 2019 (BPS Kabupaten Bojonegoro, 2025). Pola ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja sektor tanaman pangan pada pertengahan dekade belum bersifat berkelanjutan, sejalan dengan pandangan bahwa sektor pertanian di daerah agraris masih rentan terhadap tekanan struktural dan lemahnya adopsi inovasi teknologi secara konsisten (Hidayati et al., 2025).

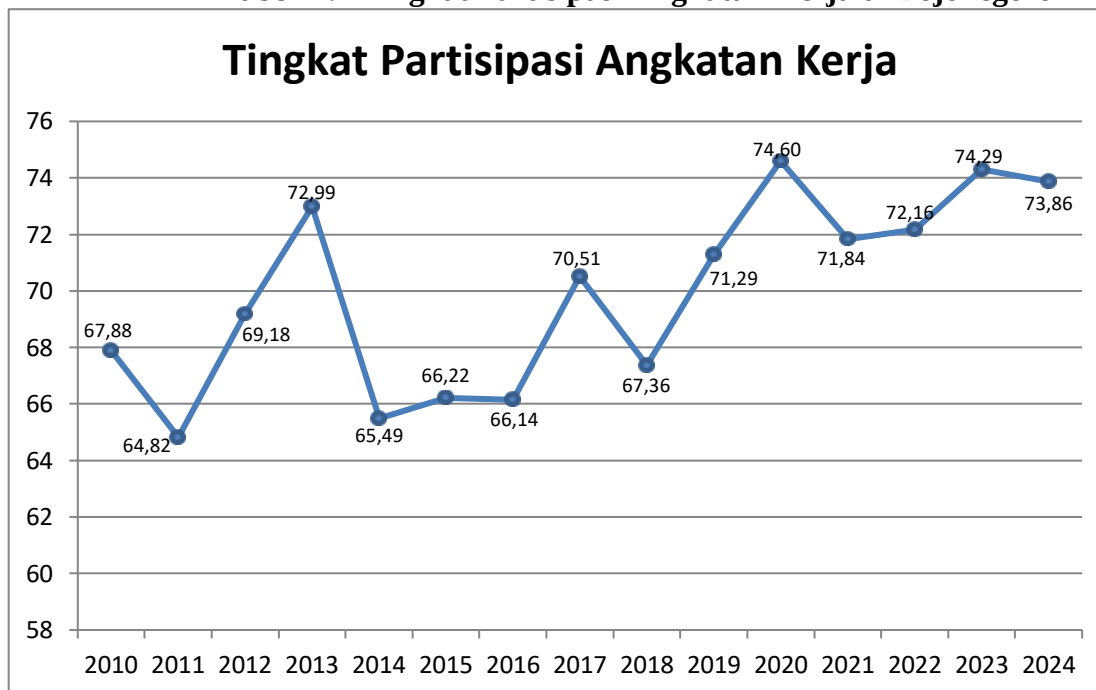
Pada tahun 2020, nilai PDRB sektor tanaman pangan kembali mengalami peningkatan cukup signifikan hingga mencapai 69,70, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor tanaman pangan masih memiliki daya tahan dan potensi kontribusi yang kuat terhadap perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa sektor pertanian sering berperan sebagai penyangga ekonomi daerah dalam kondisi ketidakpastian ekonomi (Rahmawaty et al., 2024). Namun, setelah mencapai puncaknya pada tahun 2020, nilai PDRB sektor tanaman pangan kembali mengalami penurunan menjadi 65,83 pada tahun 2021 dan 61,78 pada tahun 2022. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap produksi dan kinerja sektor pertanian, sebagaimana dikemukakan oleh *World Bank*, (2014) bahwa peningkatan investasi dan program pembangunan pertanian tidak selalu menghasilkan pertumbuhan output yang berkelanjutan apabila tidak diiringi dengan peningkatan efisiensi dan kualitas faktor produksi.

Pada dua tahun terakhir periode pengamatan, yaitu tahun 2023 dan 2024, nilai PDRB sektor tanaman pangan menunjukkan tanda-tanda pemulihan secara moderat. Nilai PDRB tercatat sebesar 63,31 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 64,36 pada tahun 2024 (B.K. Bojonegoro, 2025). Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja sektor tanaman pangan, meskipun belum kembali mencapai tingkat tertinggi seperti pada tahun 2020, yang menandakan bahwa proses pemulihan masih berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya stabil (Komalasari, 2024).

Secara keseluruhan, perkembangan PDRB sektor tanaman pangan Kabupaten Bojonegoro selama periode 2010–2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan yang belum stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor tanaman pangan masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, seperti produksi lahan, kualitas tenaga kerja

pertanian, serta efektivitas investasi dan kebijakan pembangunan pertanian daerah (Rio et al., 2023). Kondisi tersebut menegaskan pentingnya analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi PDRB sektor pertanian agar pertumbuhan sektor tanaman pangan di Kabupaten Bojonegoro dapat berlangsung secara lebih berkelanjutan (Paulina, 2020).

Tabel 1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Bojonegoro



Sumber: BPS Bojonegoro (2025).

Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bojonegoro selama periode 2010–2024, terlihat bahwa partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pola ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja daerah yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sektoral, khususnya sektor pertanian sebagai sektor dominan (B.K. Bojonegoro, 2025).

Pada tahun 2010, TPAK Kabupaten Bojonegoro tercatat sebesar 67,88 persen. Namun, pada tahun 2011 angka tersebut menurun menjadi 64,82 persen, yang mengindikasikan berkurangnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Penurunan partisipasi angkatan kerja ini dalam literatur ketenagakerjaan sering dikaitkan dengan terbatasnya

kesempatan kerja serta melemahnya daya serap sektor-sektor produktif di tingkat daerah (Paulina, 2020)

Pada tahun 2012, TPAK kembali meningkat menjadi 69,18 persen dan mengalami kenaikan yang lebih signifikan pada tahun 2013 hingga mencapai 72,99 persen. Peningkatan ini menunjukkan membaiknya kondisi partisipasi tenaga kerja, yang dapat mencerminkan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, khususnya pada sektor-sektor berbasis sumber daya lokal seperti pertanian dan kegiatan ekonomi pedesaan (Kurniawan et al., 2017). Namun demikian, pada tahun 2014 TPAK kembali menurun menjadi 65,49 persen, yang menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi tenaga kerja pada periode sebelumnya belum sepenuhnya bersifat berkelanjutan (B.K. Bojonegoro, 2025).

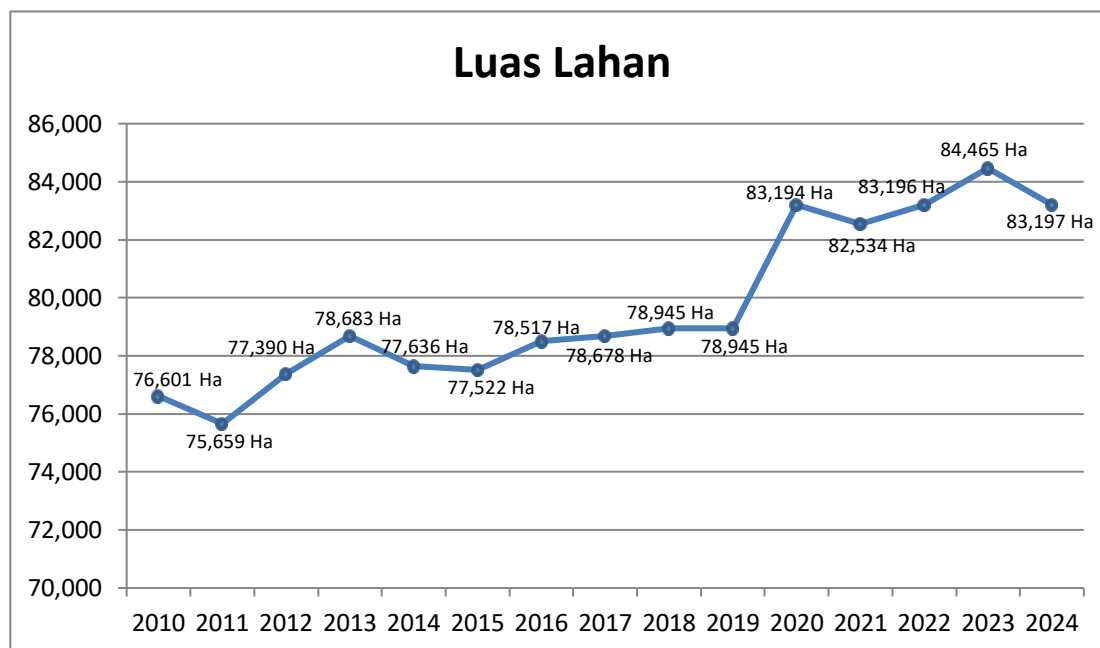
Memasuki tahun 2015, TPAK tercatat sebesar 66,22 persen dan relatif stabil pada tahun 2016 dengan nilai 66,14 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja berada pada tingkat yang moderat, sejalan dengan karakteristik daerah agraris yang tingkat penyerapan tenaga kerjanya sangat dipengaruhi oleh musim tanam dan tingkat produksi sektor pertanian (Winarso, 2014). Pada tahun 2017, TPAK kembali meningkat cukup tajam menjadi 70,51 persen, yang mengindikasikan meningkatnya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi daerah.

Pada tahun 2018, TPAK kembali mengalami penurunan menjadi 67,36 persen, sebelum kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 71,29 persen. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Kabupaten Bojonegoro masih bersifat dinamis dan rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi sektoral, terutama sektor pertanian yang mendominasi struktur ketenagakerjaan daerah (B.K. Bojonegoro, 2025).

Pada tahun 2020, TPAK mencapai 74,60 persen, yang merupakan salah satu nilai tertinggi selama periode pengamatan. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja tetap terlibat dalam kegiatan ekonomi, sejalan dengan peran sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja utama sekaligus penyangga ekonomi daerah dalam kondisi ketidakpastian ekonomi (Komalasari, 2024). Setelah itu, pada tahun 2021 TPAK mengalami penurunan menjadi 71,84 persen, namun kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 72,16 persen.

Pada dua tahun terakhir periode pengamatan, TPAK Kabupaten Bojonegoro cenderung tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi. Pada tahun 2023, TPAK tercatat sebesar 74,29 persen, sebelum sedikit menurun menjadi 73,86 persen pada tahun 2024. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja pada periode ini mencerminkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas ekonomi, khususnya sektor pertanian, yang berperan sebagai sumber utama mata pencaharian sekaligus penopang kesejahteraan masyarakat pedesaan (Mulyani, 2022).

Secara keseluruhan, perkembangan TPAK Kabupaten Bojonegoro selama periode 2010–2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pasar tenaga kerja daerah masih sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang berbasis pertanian dan dinamika ekonomi lokal (Maulidina et al., 2022). Kondisi tersebut menegaskan bahwa perubahan TPAK memiliki implikasi penting terhadap kinerja sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan PDRB sektor pertanian Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 1.3 Data Luas Lahan Tanaman Padi di Bojonegoro

Sumber: BPS Bojonegoro (2025).

Berdasarkan data perkembangan luas lahan pertanian Kabupaten Bojonegoro selama periode 2010–2024, terlihat bahwa luas lahan pertanian mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dalam jangka panjang. Pola ini mencerminkan dinamika pemanfaatan sumber daya lahan di daerah agraris yang masih menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu basis kegiatan ekonomi (B.K. Bojonegoro, 2025). Pada tahun 2010, luas lahan pertanian tercatat sebesar 76.601 hektare. Selanjutnya, pada tahun 2011 luas lahan pertanian mengalami penurunan menjadi 75.659 hektare, yang mengindikasikan adanya penyusutan lahan pertanian pada awal periode pengamatan. Dalam literatur ekonomi pertanian, penurunan luas lahan sering dikaitkan dengan alih fungsi lahan serta perubahan pola penggunaan lahan akibat tekanan pembangunan non-pertanian (Rio et al., 2023)

Pada tahun 2012, luas lahan pertanian kembali meningkat menjadi 77.390 hektare dan terus bertambah hingga mencapai 78.683 hektare pada tahun 2013. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya ekspansi atau optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Bojonegoro,

yang mencerminkan peran sektor pertanian sebagai basis ekonomi daerah yang masih mampu bertahan di tengah perubahan struktur ekonomi (Paulina, 2020). Namun demikian, pada tahun 2014 luas lahan pertanian kembali mengalami penurunan menjadi 77.636 hektare dan relatif menurun pada tahun 2015 menjadi 77.522 hektare, yang menunjukkan bahwa peningkatan luas lahan pada periode sebelumnya belum sepenuhnya bersifat berkelanjutan (B.K. Bojonegoro, 2025).

Memasuki tahun 2016, luas lahan pertanian kembali meningkat menjadi 78.517 hektare, meskipun pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan sebelum kembali meningkat pada tahun 2018 hingga mencapai 78.945 hektare. Fluktuasi yang relatif kecil pada periode ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan pertanian berada dalam kondisi cukup stabil, meskipun masih dipengaruhi oleh kebijakan tata ruang serta kondisi sosial ekonomi petani (Rahmawaty et al., 2024). Pada tahun 2019, luas lahan pertanian tercatat tetap sebesar 78.945 hektare, yang menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan dalam penggunaan lahan pertanian pada tahun tersebut.

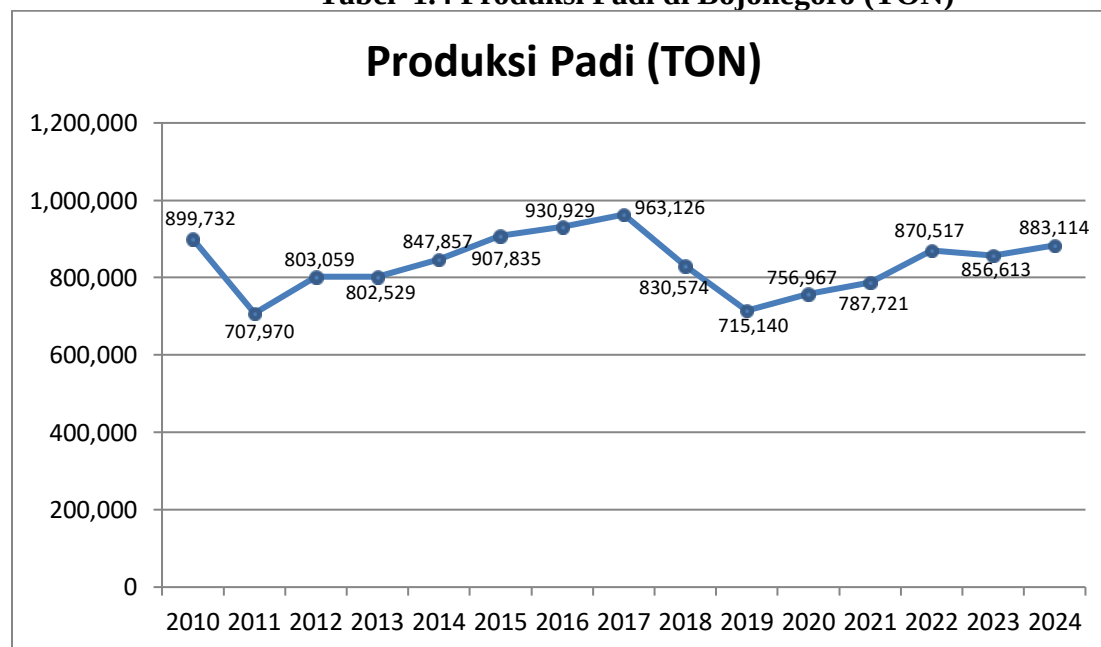
Perubahan yang lebih mencolok terjadi pada tahun 2020, ketika luas lahan pertanian meningkat cukup tajam menjadi 83.194 hektare. Peningkatan ini dapat mencerminkan respons kebijakan daerah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai penyangga ekonomi, sejalan dengan pandangan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan (Hidayati et al., 2025). Setelah itu, pada tahun 2021 luas lahan pertanian mengalami sedikit penurunan menjadi 82.534 hektare, namun kembali meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai 83.196 hektare (B.K. Bojonegoro, 2025).

Pada tahun 2023, luas lahan pertanian mencapai 84.465 hektare, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan, sebelum kembali menurun pada tahun 2024 menjadi

83.197 hektare. Penurunan pada akhir periode ini menunjukkan bahwa luas lahan pertanian masih rentan terhadap tekanan struktural, seperti alih fungsi lahan dan perubahan prioritas pembangunan daerah (*World Bank, 2014*).

Secara keseluruhan, perkembangan luas lahan pertanian Kabupaten Bojonegoro selama periode 2010–2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian masih memiliki peran penting dalam struktur ekonomi daerah, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, luas lahan pertanian merupakan salah satu faktor struktural yang berpotensi memengaruhi kinerja PDRB sektor pertanian Kabupaten Bojonegoro, sehingga relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini (Paulina, 2020).

Tabel 1.4 Produksi Padi di Bojonegoro (TON)



Sumber: BPS Bojonegoro (2025).

Berdasarkan data perkembangan produksi padi Kabupaten Bojonegoro selama periode 2010–2024, terlihat bahwa produksi padi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pola ini mencerminkan dinamika kinerja subsektor tanaman pangan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi

alam, ketersediaan faktor produksi, serta kebijakan pembangunan pertanian daerah (B.K. Bojonegoro, 2025). Pada tahun 2010, produksi padi tercatat sebesar 899.732 ton. Namun, pada tahun 2011 produksi padi mengalami penurunan cukup tajam menjadi 707.970 ton, yang menunjukkan adanya gangguan terhadap kinerja produksi pada periode tersebut. Dalam literatur pertanian, penurunan produksi padi umumnya dikaitkan dengan faktor iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, serta keterbatasan input produksi yang berdampak langsung pada hasil panen (Haryadi et al., 2011).

Memasuki tahun 2012, produksi padi kembali meningkat menjadi 803.059 ton dan relatif stabil pada tahun 2013 dengan nilai 802.529 ton. Kondisi ini menunjukkan adanya pemulihan kinerja subsektor tanaman pangan, sejalan dengan peran sektor pertanian sebagai sektor basis yang mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan lingkungan (Kurniawan et al., 2017). Selanjutnya, pada tahun 2014 produksi padi kembali meningkat menjadi 847.857 ton, yang mengindikasikan adanya perbaikan produksi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (B.K. Bojonegoro, 2025).

Peningkatan produksi padi berlanjut pada periode 2015–2017. Pada tahun 2015, produksi padi mencapai 907.835 ton, meningkat menjadi 930.929 ton pada tahun 2016, dan mencapai puncaknya pada tahun 2017 sebesar 963.126 ton. Tren peningkatan produksi pada periode ini mencerminkan optimalisasi pemanfaatan lahan dan tenaga kerja pertanian, serta adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan produksi pangan (Afriyanti et al., 2023).

Namun demikian, setelah mencapai puncak pada tahun 2017, produksi padi kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 produksi padi turun menjadi 830.574 ton, dan kembali menurun pada tahun 2019 hingga mencapai 715.140 ton. Penurunan

ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi pada periode sebelumnya belum sepenuhnya berkelanjutan dan mengindikasikan adanya tekanan struktural terhadap sektor pertanian, seperti degradasi lahan dan keterbatasan efisiensi produksi (M. Mahyuddin & Fahmid, 2019).

Pada tahun 2020, produksi padi kembali mengalami peningkatan menjadi 756.967 ton dan terus meningkat pada tahun 2021 hingga mencapai 787.721 ton. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, masih memiliki kemampuan untuk pulih dan beradaptasi terhadap tekanan ekonomi dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sektor pertanian berperan sebagai penyangga ketahanan ekonomi daerah (Maulidina et al., 2022). Selanjutnya, pada tahun 2022 produksi padi meningkat cukup signifikan menjadi 870.517 ton, sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 856.613 ton (B.K. Bojonegoro, 2025).

Pada akhir periode pengamatan, yaitu tahun 2024, produksi padi kembali meningkat menjadi 883.114 ton. Meskipun belum kembali mencapai tingkat tertinggi seperti pada tahun 2017, peningkatan ini menunjukkan adanya kecenderungan pemulihan produksi padi di Kabupaten Bojonegoro. Pola pemulihan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja produksi padi masih sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti luas lahan pertanian, kualitas tenaga kerja, serta efektivitas kebijakan dan investasi di sektor pertanian (Setyanti, 2021).

Secara keseluruhan, perkembangan produksi padi Kabupaten Bojonegoro selama periode 2010–2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan perulangan fase peningkatan dan penurunan. Kondisi ini menandakan bahwa subsektor tanaman pangan masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan produksi. Oleh karena itu, produksi padi merupakan salah satu faktor penting yang berpotensi memengaruhi PDRB sektor pertanian Kabupaten Bojonegoro dan relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini (M. Mahyuddin & Fahmid, 2019).

Secara khusus, penelitian ini merupakan kajian empiris yang menganalisis keterkaitan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), luas lahan pertanian, dan produksi padi secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian dengan pendekatan deret waktu pada level kabupaten masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung mengkaji pengaruh masing-masing variabel tersebut secara parsial atau menggunakan pendekatan data BPS Bojonegoro dan literatur review, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika struktural sektor pertanian secara mendalam dalam konteks daerah agraris seperti Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu, masih terdapat perbedaan temuan empiris mengenai sejauh mana TPAK benar-benar mampu mendorong peningkatan PDRB sektor pertanian, mengingat tingginya partisipasi tenaga kerja tidak selalu diikuti oleh peningkatan produksi. Di sisi lain, luas lahan pertanian dan produksi padi sering dianggap sebagai faktor utama pertumbuhan sektor pertanian, namun dalam praktiknya peningkatan luas lahan dan output produksi belum tentu menghasilkan pertumbuhan PDRB yang berkelanjutan apabila tidak diiringi dengan efisiensi penggunaan faktor produksi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan kondisi empiris tersebut serta adanya celah penelitian yang masih terbuka, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), luas lahan pertanian, dan produksi padi terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro selama periode 2010–2024. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi pembangunan daerah, khususnya terkait determinan pertumbuhan sektor pertanian pada wilayah berbasis agraris. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan pertanian yang lebih efektif, berorientasi pada peningkatan produksi,

tenaga kerja, optimalisasi pemanfaatan lahan, serta penguatan produksi pangan guna mendorong pertumbuhan PDRB sektor pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, kita dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah TPAK berpengaruh terhadap PDRB di Bojonegoro?
2. Apakah Luas Lahan berpengaruh terhadap PDRB di Bojonegoro?
3. Apakah Produksi Padi berpengaruh terhadap PDRB di Bojonegoro?
4. Apakah TPAK, Luas Lahan, dan Produksi Padi secara simultan berpengaruh terhadap PDRB di Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui TPAK berpengaruh terhadap PDRB di Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui Luas Lahan berpengaruh terhadap PDRB di Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui Produksi Padi berpengaruh terhadap PDRB di Bojonegoro.
4. Untuk mengetahui TPAK, Luas Lahan, dan Produksi Padi secara simultan berpengaruh terhadap PDRB di Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberi manfaat bagi peneliti, tetapi juga memberi manfaat bagi pihak lain.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian ekonomi pembangunan daerah dengan menegaskan pentingnya peran TPAK, luas lahan pertanian, dan produksi padi

dalam memengaruhi PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi studi selanjutnya dalam menganalisis hubungan antara faktor-faktor pertanian dan pertumbuhan ekonomi daerah agraris.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam merumuskan kebijakan pembangunan sektor pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pelaku usaha dan investor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi di sektor pertanian. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai peran strategis sektor pertanian dalam mendukung perekonomian daerah.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan keterbatasan yang ada, penelitian ini memerlukan pembatas ruang lingkup. Beberapa batasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian hanya berfokus pada sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro, dengan variabel yang diteliti hanya TPAK, Luas Lahan, dan Produksi Padi sehingga faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi PDRB tidak dianalisis secara mendalam.
2. Data hanya menggunakan periode tahun 2010 sampai dengan 2024, yang artinya hasil penelitian belum tentu mencerminkan kondisi jangka panjang atau perubahan struktural ekonomi di luar periode tersebut.
3. Penelitian ini hanya menggunakan analisis *time series* dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian hanya berlaku sesuai metode statistik yang digunakan dan belum membandingkan metode lain.

4. Data hanya berasal dari BPS dan Bojonegoro Dalam Angka dikarenakan ada potensi keterbaruan data yang bisa mempengaruhi hasil penelitian.